

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirudin, A. Z, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gilang Alip Utama, d, 2020, *Profil Perdagangan Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Jonegkers Tampubolon, 2020, *Perdagangan dan Bisnis Internasional : teori dan analisis empiris*, Sleman: Deepublish.
- Karnantohadi, P, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica.
- Nasional, D. P, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Puji Hastuti, dkk, 2020, *Kewirausahaan dan UMKM*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sushanty, V. R, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. Surabaya: Ubhara Press.
- Zaenal Mukarom, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu,
- Peraturan Walikota Bukittinggi. Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

C. Sumber Lain.

- Ahmad. *Usaha Perdagangan : Pengertian, Ciri dan Jenisnya*. <https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-perizinan-3.html> diakses pada tanggal 07 Mei 2023.
- Arrum, D. A, 2019, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction : Vol. 2 (No.5)*, 1633.
- DPMPTSP Kota Bukittinggi, *SI-SUTAN*, <https://dpmptsp.bukittinggikota.go.id/site/sisutan>, diakses pada 08 Agustus 2023 pukul 22.10
- Fina Nurul Farida Hidayat, A. A, 2019, Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Banjar Patroman. *Journal FH Unsoed*, 43.
- Holle, E. S, 2011, Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Jurnal Sasi Vol.17 (No.3)*, 21.
- Mayuni, A, 2021, Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan. *Institutional Repository*, 57.
- Muhammad Jibril Tajibu, H. M, 2018, Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Usaha Perdagangan Pakaian Sektor Informal di Makassar. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, Vol 1, No 1, 4.
- Prawiro, M. (2018). *Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur dan Jenis Peran*. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 05 Mei 2023.
- Rizalhadizan. (2023). *Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori dan Konsepnya*. <https://sosiologiku.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-teori-dan-konsepnya/> diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Wikipedia: Ensiklopedia Bebas. (2023). *Surat Izin Usaha Perdagangan*. https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan diakses pada tanggal 09 Mei 2023.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS BUNG HATTA FAKULTAS HUKUM

Kampus II Universitas Bung Hatta, Gedung 5 (B.2) Aie Pacah By Pass Padang
<http://www.hukum.bunghatta.ac.id> - Email : hukum@bunghatta.ac.id

Nomor : 482/Pend-02/VII-2023
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Survey/ Tugas Akhir

Padang, 6 Juli 2023

Kepada Yth :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Rizqi Fajri Fahmi
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1810012111191
Fakultas	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Tata Negara
Alamat	:	Obai Padang Lua Jorong Padang Lua I
No. HP	:	087769331850
E-mail	:	rizqifahmi27@gmail.com
Pembimbing I	:	Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
Pembimbing II	:	-
Melaksanakan Kegiatan	:	Penelitian
Waktu	:	1 Bulan
Tempat/Lokasi	:	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Dalam Rangka	:	Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online.

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut di atas bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Surat Izin Penelitian, agar yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Uling Pratimaratri, S.H., M. Hum.

Tembusan:

1. Yth. Ketua-tetua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Yth. Dosen Pembimbing



PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI

Nomor : 070/ 727 BKPol-KB/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Nomor 482/Pend-02/VII-2023, Tanggal 06 Juli 2023, Perihal Permohonan izin Melakukan Penelitian/Survey/Tugas Akhir;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIZQI FAJRI FAHMI**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 27 Juli 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Obai Padang Lua Jorong Padang Lua I, Kel Padang Lua, Kec Banuhampu
Nomor Identitas : 1306062807000001
Judul Penelitian : Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online
Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 21 Juli s/d 21 Agustus 2023
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2 Juli 2023
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
Kasubid, Kewaspadaan Dik dan Penanganan Konflik,



Terseluran kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;
4. Arsip.



Gambar 1

Dokumentasi Wawancara Dengan Ibuk Gusni Hayati (Kabid Analisis Data dan Informasi)

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kota Bukittinggi